UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kedudukan Hukum Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Siri Terhadap Harta Waris Pewaris Ditinjau Berdasarkan Asas Ijbari (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl
Nabella Salsa Diena, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H.,M.SI
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

KEDUDUKAN HUKUM ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI SIRI TERHADAP HARTA WARIS PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN ASAS IJBARI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl)

Nabella Salsa Diena[*] dan Destri Budi Nugraheni[**]

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan istri dan anak dalam perkawinan poligami siri dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak dalam perkawinan poligami siri sebagai ahli waris atau penerima wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.UTJ dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl ditinjau berdasarkan asas ijbari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang salah satunya didapatkan dari Putusan Pengadilan. Penelusuran data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kedudukan istri dari perkawinan poligami siri tidak diakui sebagai istri sah sehingga ia tidak berhak mewaris, namun atas dasar keadilan dan kemashlahatan, hakim dapat memberikan wasiat wajibah. Sementara bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak dari perkawinan yang dilakukan sesuai agama Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga baginya hanya berlaku wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kedua, pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri pada perkawinan poligami siri dalam Putusan Nomor 547 Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Putusan Nomor 183 Pengadilan Agama Muara Bulian telah sesuai dengan ketentuan asas ijbari sebab istri tidak dapat mewaris karena perkawinan dianggap tidak sah. Namun, dalam menentukan kedudukan anak dalam perkawinan poligami siri, hakim belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan asas ijbari. Hakim menilai bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada terpenuhinya ketentuan *syara'* agama Islam dan menganggap pencatatan hanya bersifat kewajiban administratif, sehingga anak dari perkawinan poligami siri pada Putusan Nomor 547 Pengadilan Agama Ujung Tanjung tetap dikategorikan sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Poligami Siri, Asas Ijbari

[*] Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
[**] Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kedudukan Hukum Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Siri Terhadap Harta Waris Pewaris Ditinjau Berdasarkan Asas Ijbari (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl
Nabella Salsa Diena, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H.,M.SI
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LEGAL STATUS OF WIFE AND CHILDREN FROM UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGE IN RELATION TO THE DECEASED'S INHERITANCE BASED ON THE PRINCIPLE OF IJBARI

(A Study of Religious Court Decicions Number 547/Pdt.G/2023/PA.Utj and 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl)

Nabella Salsa Diena[*] and Destri Budi Nugraheni[**]

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal status of wives and children in inregistered polygamous marriages under SEMA Number 3 of 2018, SEMA Number 2 of 2019 and SEMA Number 3 of 2023. In addition, this study also examines the judges' considerations in determining the status of wives and children from unregistered polygamous marriages as heirs or recipients of wasiat wajibah in Religious Cour Decisions Number 547/Pdt.G/2023/PA.UTJ and 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl based on the principle of ijbari.

This research is a normative legal research. The data used are secondary data, including Religious Court Decisions. Data collection was conducted through library research and interviews with relevant sources. The collected data were processed and analyzed qualitatively, followed by descriptive conclusions in accordance with formulated research problems.

The results of this study can be concluded as follows. First, the status of a wife in an unregistered polygamous marriage is not recognized as a lawful wife. Therefore, the wife is not entitled to inherit. However, based on judges' considerations of justice and public benefit (maslahah), judges may grant her wasiat wajibah. Meanwhile, children born from an uregistered polygamous marriage only receive wasiat wajibah as regulated in SEMA Number 3 of 2023. Second, the judges' considerations in determining the status of wives in an unregistered polygamous marriage in Religious Cour Decisions Number 547/Pdt.G/2023/PA.UTJ and 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl are consistent with the principle of ijbari. The wives are not entitled to inherit because of the marriages are considered legally invalid. However, in determining the status of children from an unregistered polygamous marriages, the judges' considerations are not entirely aligned with the principle of ijbari. The judges considered that the validity of marriage was sufficiently based on compliance with Islamic religious requirements and viewed marriage registration merely as an administrative obligation. Consequently, the children from an unregistered polygamous marriage in Religious Cour Decisions Number 547/Pdt.G/2023/PA.UTJ was still categorized as a legal heirs.

Keywords: Legal Status, Unregistered Polygamous Marriage, Principle of Ijbari.

[*] Faculty of Law, Gadjah Mada University.
[**] Faculty of Law, Gadjah Mada University.